

## **Minimnya Edukasi Literasi Keuangan Syariah KSPPS BMT dan Preferensi Pembiayaan Konvensional Perspektif Fungsionalisme Struktural**

**Yadi Hendrawan**

Sties Khas Al Jaelani, Indonesia

[yadihendrawan@stieskhas.ac.id](mailto:yadihendrawan@stieskhas.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana minimnya edukasi literasi keuangan Syariah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT dan preferensi pembiayaan konvensional berkontribusi terhadap rendahnya pemahaman pedagang pasar terhadap sistem keuangan syariah, yang mendorong mereka untuk lebih memilih pembiayaan konvensional. Penelitian dilakukan di Pasar Kramat, Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Alfa Dirham Mandiri belum secara aktif melaksanakan fungsi edukatif dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan keuangan syariah kepada pedagang pasar, sehingga mayoritas pedagang belum memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional. Dalam kerangka teori fungsionalisme struktural *Talcott Parsons* (AGIL), KSPPS gagal memenuhi fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian nilai (*latency*), yang menyebabkan terganggunya keseimbangan sistem sosial ekonomi pasar. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan peran edukatif KSPPS melalui pendekatan partisipatif, kolaborasi dengan tokoh agama dan pemangku kepentingan lokal, serta digitalisasi materi edukatif. Upaya ini penting untuk menjadikan KSPPS sebagai pusat dakwah ekonomi syariah yang mampu mendorong transformasi sistem sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

**Kata Kunci:** KSPPS BMT, Peran Edukatif, Fungsionalisme Struktural AGIL, Literasi Keuangan Syariah

### **PENDAHULUAN**

Kajian tentang KSPPS tidak lepas dari dikotomi antara koperasi syariah dan koperasi konvensional dengan berbagai persoalannya. Perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional mencerminkan dikotomi mendasar dalam hal prinsip, orientasi, serta perilaku kelembagaan (Ningsih, 2018). Koperasi konvensional pada umumnya dibangun di atas asas-asas ekonomi modern yang bersifat sekuler, berlandaskan prinsip efisiensi, keuntungan bersama, dan keadilan sosial secara umum. Sementara itu, koperasi syariah berangkat dari nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), larangan riba, serta berorientasi pada keberkahan dan kemaslahatan anggota secara holistik, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga spiritual.

Dari segi sistem transaksi, koperasi syariah menerapkan akad-akad yang sesuai syariat Islam, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli margin), dan ijarah (sewa menyewa). (Nurhab, 2020) Tidak ada sistem bunga di dalamnya, karena riba dilarang dalam Islam. Sebaliknya, koperasi konvensional menggunakan skema simpan pinjam berbasis bunga (*interest*) yang secara prinsip bertujuan untuk

mengembangkan modal usaha dan kesejahteraan anggota, namun tidak mempertimbangkan aspek halal-haram secara agama (Ningsih, 2018).

Dalam hal layanan dan produk, koperasi syariah cenderung melibatkan dimensi edukatif dan moral. Anggota tidak hanya menjadi nasabah atau peminjam, tetapi juga dibina dalam hal spiritual, akhlak bisnis, bahkan diberi motivasi untuk berzakat dan bersedekah. Hal ini berbeda dengan koperasi konvensional yang lebih fokus pada pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi tanpa intervensi nilai-nilai religius. (Ningsih, 2018)

Selain itu, koperasi syariah umumnya memiliki peran sosial-kultural yang kuat di lingkungan berbasis keislaman, seperti pesantren, masjid, atau komunitas Muslim. Koperasi ini bukan hanya sarana ekonomi, tetapi juga bagian dari gerakan dakwah ekonomi. (Ningsih, 2018) Sementara koperasi konvensional banyak tumbuh dari lingkungan umum seperti tempat kerja, institusi pendidikan, atau komunitas wilayah, dan lebih bersifat netral secara ideologis.

Meskipun koperasi syariah menawarkan pendekatan yang etis dan religius, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, serta kepercayaan publik yang belum merata. Di sisi lain, koperasi konvensional yang telah lebih dulu berkembang dianggap lebih praktis dan familiar bagi sebagian besar masyarakat. Inilah bentuk dikotomi yang menunjukkan bahwa perbedaan antara keduanya bukan sekadar struktural, tetapi juga bersifat paradigmatic yakni menyangkut cara pandang terhadap tujuan dan nilai-nilai dalam aktivitas ekonomi.

Jika dilihat dari aturan yang berlaku dalam regulasi koperasi dan lembaga keuangan syariah, KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri pada dasarnya terikat pada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan operasional koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Indonesia, 2012), serta mengacu pada pedoman Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait praktik pembiayaan syariah. Namun dalam praktik di lapangan, sering kali terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan ideal tersebut. Misalnya, penyaluran pembiayaan yang seharusnya berbasis produktif seringkali lebih dominan digunakan untuk keperluan konsumtif anggota, tanpa adanya pendampingan atau edukasi keuangan yang memadai.

Lebih lanjut, dalam proses akad dan administrasi, kadang ditemukan kelemahan dari sisi transparansi dan pemahaman anggota, sehingga memunculkan risiko kesalahpahaman antara pihak koperasi dan anggota, terutama dalam hal penetapan margin atau mekanisme pengembalian. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan internal dan keterbatasan kapasitas manajemen dalam menjalankan fungsi kelembagaan sesuai prinsip tata kelola syariah yang baik (*Good Islamic Cooperative Governance*). KSPPS BMT bisa terganggu stabilitasnya oleh praktik operasional yang tidak sesuai regulasi, seperti penggunaan dana simpanan yang tidak proporsional atau keterlambatan penyaluran pembiayaan yang memicu distrust dari anggota.

Kondisi seperti ini jelas menimbulkan kerawanan sistemik yang jika dibiarkan, bisa mengganggu kepercayaan anggota dan bahkan menarik perhatian dari otoritas pengawas, seperti Dinas Koperasi atau Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya

penataan ulang dan transformasi internal secara bertahap yang berfokus pada profesionalisme, keterbukaan, serta penguatan fungsi edukasi agar koperasi ini benar-benar menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Dibalik berbagai keterbatasan dan penyimpangan terhadap fungsi ideal lembaga keuangan syariah, KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri tetap menunjukkan eksistensinya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selama lebih dari satu dekade beroperasi, KSPPS BMT ini tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi sebagian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan pedagang pasar, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar edukatif dan pemberdayaan ekonomi syariah yang seharusnya diemban oleh koperasi keuangan berbasis syariah. Bahkan, dalam beberapa aspek, keberadaannya turut mengakomodasi praktik-praktik yang secara normatif bisa dianggap menyimpang dari prinsip ideal koperasi maupun prinsip syariah — seperti dominasi pembiayaan konsumtif, minimnya transparansi akad, atau belum adanya literasi syariah yang mendalam di kalangan anggota.

Fakta ini tentu memunculkan persoalan mendasar bagaimana mungkin sebuah koperasi syariah dapat terus bertahan dan berkembang, meskipun tidak sepenuhnya menjalankan perannya sebagai agen edukasi dan pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh? Tujuan penelitian ini menganalisis secara mendalam bagaimana ketidakhadiran peran edukatif Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Alfa Dirham Mandiri berkontribusi terhadap rendahnya pemahaman pedagang pasar terhadap sistem keuangan syariah, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk lebih memilih pembiayaan konvensional yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pendekatan fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL digunakan sebagai kerangka analisis (Turama, 2020). Dengan teori ini, akan ditunjukkan bagaimana struktur dan fungsi yang saling bergantung dalam sistem KSPPS BMT ini tetap bekerja secara minimal untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi di kalangan anggotanya, meskipun dalam realitasnya terjadi benturan antara idealisme kelembagaan syariah dan kebutuhan pragmatis masyarakat yang dilayani.

Dalam konteks eksistensi KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri, terdapat kenyataan bahwa kepentingan ekonomi anggota dan ikatan sosial turut membentuk dan mempertahankan keberlangsungan koperasi ini. KSPPS tidak semata-mata berjalan karena kekuatan formal kelembagaan, tetapi juga karena adanya kesepakatan tak tertulis dan pemakluman bersama antara pihak pengelola dan anggota, bahkan dalam beberapa hal juga melibatkan pengaruh dari pengurus pasar, tokoh agama yang dihormati. Dengan demikian, menarik untuk melihat keberadaan BMT ini dalam perspektif sosiologis struktural, di mana koperasi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan, melainkan juga sebagai sistem sosial yang bekerja melalui berbagai struktur fungsional, termasuk menjalankan peran sebagai lembaga edukasi syariah yang bertugas menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam kepada anggotanya serta membentuk kesadaran kolektif untuk menjauhi praktik ribawi.

Masalah ini menarik untuk dikaji, karena KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan semata, tetapi juga berperan penting sebagai lembaga edukasi syariah. Artinya, koperasi ini tidak hanya menyalurkan pembiayaan kepada

anggotanya, melainkan juga aktif menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti pentingnya menghindari riba, hidup hemat, serta menjalankan usaha secara halal dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan seperti penyuluhan, pembinaan anggota, dan pendampingan usaha, KSPPS ini membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat lebih memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, koperasi syariah ini tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang kuat secara moral dan spiritual.

Selain itu, pembahasan koperasi syariah dalam konteks sosiologis yang memperlihatkan kemampuannya beradaptasi di tengah sistem ekonomi modern yang serba materialistik juga masih sangat jarang mendapat perhatian peneliti. Kajian terhadap KSPPS umumnya hanya terbatas pada aspek keuangan dan operasional, padahal peran koperasi seperti BMT Alfa Dirham Mandiri jauh lebih luas. Koperasi ini secara aktif menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam kepada anggotanya, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjauhi praktik riba, berwirausaha secara halal, dan membangun ekonomi secara bertanggung jawab. Kajian mendalam terhadap peran edukatif KSPPS ini berpotensi mengungkap dampak sosial yang lebih luas, seperti terbentuknya solidaritas ekonomi umat, pergeseran gaya hidup konsumtif menjadi produktif, hingga terbentuknya komunitas ekonomi yang berakar pada nilai-nilai spiritual Islam. Bahkan, dalam praktiknya, KSPPS ini mampu menyentuh aspek-aspek kerjasama sosial lintas latar belakang, memberdayakan kelompok marginal, dan mengembangkan sistem pembinaan usaha mikro yang terbuka dan terorganisir secara kolektif oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat relevan untuk mengkaji peran KSPPS tidak hanya dari sisi keuangan, melainkan juga sebagai lembaga keuangan syariah yang bisa memberikan edukasi syariah yang berperan sebagai agen transformasi sosial dan spiritual, yang secara aktif menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam serta memperkuat ketahanan moral ekonomi umat di era modern."

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka kajian terhadap KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri dalam perspektif struktural fungsional diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini menambah khazanah ilmu dalam kajian sosiologi ekonomi Islam dan fungsi kelembagaan koperasi syariah dalam membentuk sistem sosial masyarakat. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan peran edukatif KSPPS, khususnya dalam menyosialisasikan nilai-nilai ekonomi syariah secara lebih efektif. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial dan moral masyarakat menuju kemandirian dan keberkahan ekonomi.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap peran edukatif KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri serta kecenderungan pedagang pasar dalam memilih pembiayaan konvensional. Fokus kajian diarahkan pada lembaga KSPPS itu sendiri beserta para pemangku kepentingan yang terlibat, seperti pengurus koperasi, pedagang pasar, pengelola pasar, tokoh agama, dan pakar ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kontekstual berbagai faktor

yang memengaruhi rendahnya intensitas peran edukatif koperasi syariah, serta alasan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi preferensi pedagang terhadap pembiayaan konvensional.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan secara langsung terhadap aktivitas operasional KSPPS, sedangkan wawancara dilakukan secara purposive terhadap lima informan kunci yang memiliki keterkaitan langsung dan pemahaman atas isu yang dikaji, yaitu pengurus KSPPS, pedagang pasar, pengelola pasar, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai data visual dan tertulis seperti foto kegiatan serta pencatatan administratif. Untuk menjamin validitas data, peneliti melakukan teknik *cross-check* dan *recheck* antarinforman secara sistematis.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan *Miles dan Huberman*, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Proses analisis berlangsung secara iteratif dan simultan selama keseluruhan tahapan penelitian berlangsung hingga data dianggap mencukupi dan tidak ditemukan informasi baru. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 24 hingga 30 Juli 2025. Untuk menjamin keabsahan dan kedalaman temuan, peneliti menerapkan triangulasi data, baik dari segi teknik, sumber, maupun waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Singkat KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dirham Mandiri didirikan pada tahun 2015 sebagai bentuk pengembangan dari Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Islam Tarbiyatul Banin. Lahir dari semangat kemandirian ekonomi umat, koperasi ini berawal dari modal swadaya yang dihimpun oleh para pengurus Pondok Pesantren Islam Tarbiyatul Banin. (Akrom, 2022)

Inisiasi pendirian KSPPS ini digagas oleh Dr. Achmad Cholik, selaku Ketua Yayasan Islam Tarbiyatul Banin, yang memiliki visi untuk menghadirkan lembaga keuangan syariah di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar. Letak pondok pesantren yang berdekatan dengan Pasar Kramat, Desa Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, menjadi peluang strategis dalam menjangkau pedagang pasar dan pelaku usaha kecil menengah di wilayah tersebut. (Hendrawan, 2023)

Selain itu, keberadaan komunitas industri bata alam dan batu kapur di kawasan Gunung Kuda turut mendorong terbentuknya lembaga keuangan mikro syariah yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan dan simpanan masyarakat setempat secara adil dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Sejak awal berdirinya, KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi edukatif dan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

### **Keunikan KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri sebagai Objek Penelitian**

KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri memiliki sejumlah karakteristik unik yang menjadikannya objek yang tepat dan relevan untuk dianalisis dalam kerangka teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Pertama, koperasi ini berdiri sejak tahun 2015 dan telah beroperasi selama hampir satu dekade di tengah-tengah komunitas pedagang pasar tradisional serta pelaku UMKM berbasis lokal seperti pengrajin batu alam dan batu kapur.

Keberadaannya yang strategis berdekatan langsung dengan Pasar Tradisional Kramat di wilayah Dukupuntang, Kabupaten Cirebon menjadikan koperasi ini memiliki potensi kuat dalam memberikan akses pembiayaan syariah serta edukasi literasi keuangan kepada komunitas ekonomi akar rumput.

Kedua, KSPPS ini beroperasi di wilayah yang secara sosiokultural masih kental dengan nilai-nilai keislaman, sehingga penerapan sistem keuangan syariah seharusnya memiliki peluang besar untuk diterima. Namun, justru ditemukan adanya preferensi masyarakat, khususnya pedagang pasar, terhadap pembiayaan konvensional. Kondisi ini menunjukkan adanya disfungsi dalam struktur peran edukatif koperasi, yang sangat menarik untuk dikaji dari perspektif AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*).

Ketiga, keberadaan sektor usaha lokal seperti UMKM batu alam dan batu kapur menunjukkan potensi ekonomi mikro yang tinggi dan membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Namun, kurangnya literasi keuangan syariah menjadi kendala utama dalam membentuk pola ekonomi yang adil, inklusif, dan sesuai prinsip Islam.

Dengan karakteristik tersebut, KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri menjadi objek yang ideal untuk mengkaji sejauh mana kelembagaan keuangan syariah menjalankan fungsi edukatifnya dalam menjaga keseimbangan sistem sosial ekonomi masyarakat lokal, serta bagaimana kegagalan fungsi tersebut berdampak pada kecenderungan masyarakat memilih sistem keuangan konvensional.

### **Minimnya Edukasi Literasi Keuangan Syariah KSPPS BMT dan Preferensi Pembiayaan Konvensional Perspektif Fungsionalisme Struktural**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Alfa Dirham Mandiri seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan semata, melainkan sebagai sistem sosial yang mampu menjalankan empat fungsi utama sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parsons melalui kerangka AGIL: *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*. (Turama, 2020) Namun, absennya peran edukatif yang sistematis dan berkelanjutan dari KSPPS ini mengakibatkan disfungsi dalam pelaksanaan keempat fungsi tersebut, sehingga memicu kecenderungan pedagang pasar untuk lebih memilih pembiayaan konvensional yang dianggap lebih praktis dan familiar.

#### ***Adaptation***

Dalam fungsi adaptasi, KSPPS dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah dan dominasi lembaga konvensional yang agresif dalam pendekatan layanan. Minimnya edukasi membuat KSPPS tidak kompetitif, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Kartono, seorang pedagang, bahwa dia mengenal BMT namun tidak memahami mekanismenya, dan lebih memilih lembaga konvensional karena prosesnya cepat dan tidak rumit. Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Fivi selaku pengurus KSPPS yang mengakui belum maksimal dalam menjangkau pedagang kecil, khususnya dalam penyuluhan awal. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kemampuan adaptasi KSPPS dalam menjawab kebutuhan praktis masyarakat pasar, yang berdampak pada preferensi pedagang terhadap sistem konvensional.

### **Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)**

Tujuan KSPPS untuk membangun kesejahteraan ekonomi dan spiritual tidak tercapai secara optimal karena rendahnya pemahaman anggota terhadap konsep syariah. Tanpa peran edukatif yang kuat, visi koperasi menjadi kabur. Pak Kunandar, seorang pedagang, menyatakan bahwa meskipun prosedur BMT terasa panjang, ia tetap bertahan karena keinginannya menjauhi riba dan meraih keberkahan usaha. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala administratif, sebagian anggota tetap memiliki motivasi spiritual. Dalam kerangka AGIL, ini menunjukkan bahwa fungsi goal attainment dan latency masih hidup, namun tidak tersebar merata karena absennya strategi edukatif yang sistematis.

### **Integration**

Fungsi integrasi menuntut terbangunnya hubungan sosial dan emosional yang kuat antara koperasi dan masyarakat. Namun, lemahnya komunikasi, sosialisasi, dan kegiatan berbasis komunitas membuat KSPPS gagal menumbuhkan rasa memiliki di kalangan anggotanya. Bapak H. Sukarya, pengurus pasar, mengusulkan agar KSPPS mengadakan kajian rutin atau pelatihan wirausaha syariah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Sementara itu, Pak Hapit, staf KSPPS, mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan BMT dengan koperasi biasa. Hal ini memperjelas bahwa fungsi integrasi belum berjalan efektif, karena koperasi gagal memposisikan dirinya sebagai bagian dari komunitas yang inklusif dan milik bersama.

### **Latency (Pemeliharaan Pola dan Nilai)**

Fungsi laten berkaitan dengan pelestarian nilai dan internalisasi norma dalam jangka panjang. Namun, ketidakhadiran pembinaan dan penyuluhan menyebabkan nilai-nilai ekonomi syariah tidak terinternalisasi. Pak Imam, tokoh agama sekaligus anggota, menyayangkan tidak adanya penyuluhan rutin, sementara Ibu Ilah, anggota koperasi, mengaku tidak mengetahui nilai-nilai syariah di balik BMT karena tidak pernah mendapat pembinaan. Kedua pernyataan ini menegaskan bahwa fungsi laten tidak berjalan, dan nilai-nilai seperti anti-riba, tolong-menolong, serta keadilan belum tertanam dalam kesadaran kolektif anggota.

### **Analisis Sistem Sosial dan Potensi Perbaikan**

Jika dianalisis sebagai sebuah sistem sosial melalui teori AGIL, maka ketidakhadiran peran edukatif KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri menyebabkan kegagalan dalam memenuhi keempat fungsinya. Pada fungsi adaptasi, KSPPS gagal membaca kebutuhan pasar dan membentuk strategi pendekatan yang kontekstual. Dalam fungsi goal attainment, meskipun nilai spiritual masih menjadi daya tarik, pencapaian tujuan tidak menyeluruh. Pada fungsi integrasi, absennya keterlibatan emosional dan kegiatan sosial menyebabkan relasi antara koperasi dan komunitas tidak terbangun. Sedangkan dalam fungsi latency, nilai-nilai syariah belum berhasil dilestarikan dan ditanamkan secara berkelanjutan kepada anggota. Akibat dari tidak optimalnya keempat fungsi ini, banyak pedagang pasar yang lebih memilih pembiayaan konvensional karena dinilai lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan praktis mereka.

Namun demikian, potensi KSPPS Alfa Dirham Mandiri untuk menjadi agen perubahan tetap terbuka luas. Apabila fungsi edukatif dikuatkan melalui strategi komunikasi sosial yang terencana, berkelanjutan, dan menyentuh langsung kebutuhan komunitas, maka

keempat fungsi AGIL dapat diaktifkan secara sinergis. Dengan demikian, peran KSPPS tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pusat internalisasi nilai ekonomi Islam yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat pasar.

Tabel 1. Penerapan Fungsi AGIL di Ketidakhadiran Peran Edukatif Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Alfa Dirham Mandiri dan Kecenderungan Pedagang Pasar pada Pembiayaan Konvensional

| Fungsi AGIL         | Jenis Penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptation (A)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya literasi syariah di kalangan pedagang pasar.</li> <li>- Pedagang cenderung memilih pembiayaan konvensional karena lebih cepat dan praktis.</li> <li>- KSPPS belum maksimal memberikan edukasi sederhana dan mudah dipahami.</li> </ul>                                 |
| Goal Attainment (G) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian anggota tetap bertahan karena motivasi spiritual, seperti menghindari riba.</li> <li>- Tujuan keberkahan usaha menjadi motivasi selain aspek teknis pembiayaan.</li> <li>- Masih ada kesadaran akan nilai ekonomi syariah meski proses layanan dirasa rumit.</li> </ul> |
| Integration (I)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya kegiatan sosial dan edukatif yang membangun keterikatan anggota.</li> <li>- Belum terbangun rasa memiliki komunitas terhadap KSPPS.</li> <li>- Kurang adanya kajian rutin atau pelatihan kewirausahaan syariah di pasar.</li> </ul>                                     |
| Latency (L)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya pembinaan khusus terkait nilai-nilai syariah.</li> <li>- Banyak anggota tidak memahami prinsip dasar keuangan syariah.</li> <li>- Kurangnya penyuluhan dan transmisi nilai secara berkelanjutan.</li> </ul>                                                         |

Ketidakhadiran peran edukatif KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri dalam memenuhi fungsi sosialnya telah menunjukkan adanya saling keterkaitan antareleman dalam sistem sosial yang memengaruhi kecenderungan pedagang pasar untuk memilih pembiayaan konvensional. Dalam perspektif fungsionalisme struktural *Talcott Parsons*, setiap elemen dalam sistem tersebut seharusnya saling menopang demi menjaga stabilitas sistem. Peran edukatif tidak hanya diarahkan pada pencapaian tujuan internal koperasi, melainkan juga pada pemeliharaan relasi eksternal yang strategis, seperti dengan tokoh agama yang memahami pentingnya keberkahan dalam usaha ekonomi, bukan sekadar berorientasi pada profit semata. Tokoh agama memiliki posisi penting dalam mendorong transformasi nilai dan sikap masyarakat agar lebih mendekati sistem ekonomi syariah yang berkeadilan. Melihat potensi yang ada, maka adaptasi dan transformasi strategis sangat diperlukan agar KSPPS dapat berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan, melainkan juga sebagai pusat dakwah ekonomi syariah yang menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat secara komprehensif.

Tujuan awal pendirian KSPPS oleh tokoh pesantren adalah untuk menjadikannya sebagai episentrum pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Maka dari itu, absennya peran edukatif KSPPS ini tidak boleh dimaknai sebagai kelemahan final, tetapi sebagai peluang untuk membangun strategi baru yang lebih efektif dan berkelanjutan. Transformasi tersebut harus dimulai dengan memperkuat fungsi edukatif (latency) melalui pendekatan

partisipatif dan kontekstual, seperti penyuluhan langsung di pasar, kegiatan berbasis komunitas, dan digitalisasi materi edukasi agar lebih mudah diakses pedagang. Pada saat yang sama, KSPPS perlu meningkatkan fungsi adaptasi dengan menyediakan produk pembiayaan syariah yang fleksibel dan sesuai kebutuhan riil pedagang pasar, sehingga mereka tidak hanya memahami, tetapi juga merasa diakomodasi. Di sisi lain, integrasi sosial (integration) harus ditingkatkan melalui kerja sama aktif dengan tokoh masyarakat, pengelola pasar, dan pemerintah, guna menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik sehari-hari.

Dengan strategi yang tepat, KSPPS dapat mempertahankan peran edukatifnya sekaligus memperkuat keberadaannya sebagai bagian integral dari sistem sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bila seluruh langkah strategis ini diterapkan secara konsisten, maka berdasarkan teori Talcott Parsons, sistem sosial akan mencapai stabilitas, karena setiap subsistem menjalankan peranannya secara optimal. Fungsi edukatif (latency) akan berlangsung melalui internalisasi nilai ekonomi syariah, fungsi adaptasi akan terpenuhi dengan tersedianya layanan pembiayaan yang sesuai kebutuhan, tujuan kolektif (goal attainment) berupa terbentuknya ekosistem ekonomi Islam akan tercapai, dan integrasi (integration) akan diperkuat melalui sinergi lintas aktor sosial. Dalam kondisi tersebut, KSPPS bukan hanya berfungsi secara teknis, melainkan juga sebagai kekuatan sosial yang menopang transformasi ekonomi menuju masyarakat yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap minimnya edukasi literasi keuangan syariah KSPPS BMT dan preferensi pembiayaan konvensional perspektif fungsionalisme struktural *Talcott Parsons*, dapat disimpulkan bahwa absennya fungsi edukatif yang seharusnya dijalankan oleh KSPPS telah mengganggu keseimbangan sistem sosial ekonomi masyarakat pasar. Dalam kerangka AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*), KSPPS gagal menjalankan peran adaptasi terhadap kebutuhan informasi pedagang, tidak optimal dalam pencapaian tujuan edukasi keuangan syariah, lemah dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan realitas kebutuhan pelaku pasar, serta tidak berhasil mentransmisikan dan melestarikan nilai-nilai ekonomi syariah secara berkelanjutan. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan pemahaman di kalangan pedagang mengenai sistem keuangan syariah, yang berkontribusi pada kecenderungan mereka untuk tetap memilih pembiayaan konvensional yang dianggap lebih mudah diakses, meskipun bertentangan dengan prinsip syariah. Simpulan ini menunjukkan pentingnya revitalisasi peran edukatif KSPPS dalam membangun kesadaran dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat pasar demi terciptanya sistem sosial ekonomi yang lebih seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **REFERENSI**

- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58-69.
- Kingsbury, N., & Scanzoni, J. (1993). Structural-functionalism. In *Sourcebook of family theories and methods: A contextual approach* (pp. 195-221). Springer US.

- Nur'aen, A., & Pratama, G. (2025). Penerapan Good Governance Dalam Koperasi Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Anggota. *Jurnal Study Islam*, 1(01), 18-24.
- Prihatini, D., Puspitasari, N., Suroso, I., & Muhsyi, A. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Islam Pada KSPPS di Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(4), 72-80.
- Sobana, D. H., Yusup, D. K., Asih, V. S., Yulandri, E., & Ahmad, F. Z. (2024). Strengthening Financial Literacy and Inclusion in Islamic Cooperatives Through Mentorship and Counseling in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 171-193.
- Nurhab, M. I., & Nurjanah, S. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Dan Trust Terhadap Keputusan Anggota Non Muslim BMT Assyafiiyah Berkah Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 232-246.
- AMIR, P. A. I. PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENABUNG ANGGOTA KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL SKRIPSI.
- Hilal, S., Fitri, A., & Ermawati, L. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 14-18.
- Akrom, M., Fatahillah, M., Husnaeni, N., & Adawiyah, R. (2022). Implementation Of 5c Based Financing In Bmt Alfa Dirham Mandiri. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 3083-3094.
- Hendrawan, Y., Surya, C. M., & Nasiah, R. Z. (2023). The Role of Sharia Savings and Loans and Financing Cooperatives (KSPPS) in Community Economic Empowerment (Study at KSPPS BMT Alfa Dirham Mandiri Cirebon). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(12), 4049-4058.
- Ningsih, D. A., & Masruroh, A. H. (2018). Analisis perbandingan sistem pemberian kredit pada koperasi syariah dan koperasi konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), 85-94.
- Indonesia, R. (2012). Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. *Lembaran Negara Tahun*, 40.